

ABSTRAK

Manusia sebagai makhluk sosial membangun hubungan timbal balik dalam sebuah perjanjian untuk menjamin hak dan kewajiban. Pelaksanaan perjanjian membutuhkan lembaga jaminan, seperti jaminan hak tanggungan atas tanah dan/atau rumah. Saat debitur wanprestasi, pemegang hak tanggungan berhak menjual lelang objek jaminan hak tanggungan untuk melunasi piutang. Pelaksanaan lelang dapat menghadapi dipengaruhi oleh Putusan Provisi Pengadilan Negeri.

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui akibat hukum adanya Putusan Provisi Pengadilan Negeri dalam pelaksanaan lelang eksekusi objek jaminan hak tanggungan di KPKNL Yogyakarta dan mengetahui mekanisme pelaksanaan lelang eksekusi objek jaminan hak tanggungan atas adanya Putusan Provisi Pengadilan Negeri di KPKNL Yogyakarta.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum non-doktrinal, khususnya penelitian yuridis empiris dengan mengumpulkan data primer dan data sekunder. Data primer dikumpulkan melalui wawancara terbuka dan semi-terstruktur, serta data sekunder dikumpulkan melalui studi pustaka. Baik data primer maupun data sekunder yang diperoleh dianalisis secara deskriptif analitis.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa akibat hukum adanya Putusan Provisi Pengadilan Negeri dalam pelaksanaan lelang eksekusi objek jaminan hak tanggungan di KPKNL Yogyakarta terdiri dari penundaan atau pembatalan rencana pelaksanaan lelang, serta pengosongan terhadap objek jaminan hak tanggungan tersebut. Mekanisme pelaksanaan lelang eksekusi objek jaminan hak tanggungan atas adanya Putusan Provisi Pengadilan Negeri di KPKNL Yogyakarta dibedakan berdasarkan akibat hukumnya, dengan mengikuti ketentuan yang tercantum dalam PMK Nomor 122 Tahun 2023 serta praktik yang diterapkan dalam pelaksanaan lelang eksekusi objek jaminan hak tanggungan di KPKNL Yogyakarta.

Kata Kunci: Lelang Eksekusi, Hak Tanggungan, KPKNL, Putusan Provisi, Pengadilan Negeri